

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah unsur pelaksana desentralisasi dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 24 November 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (Pasal 33 Ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (Pasal 33 Ayat 4).

Pemberdayaan Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*). Potensi dan peran strategisnya menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). Sebagai pelaku ekonomi, merupakan perluasan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*).

Pembangunan Perindustrian merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. *Esensi* pembangunan industri adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk agar memiliki daya saing.

Peran sektor Perdagangan semakin penting untuk mendukung sektor industri, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, turisme,

pertambangan, dan lain-lain. Meliputi revitalisasi dan harmonisasi pasar tradisional - pasar modern, perlindungan konsumen, penyediaan kebutuhan pokok, stabilitas harga, serta sinergi pengembangan UMKM dan petani di bidang perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.

LKIP Tahun 2019 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala merupakan hasil evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada bidang urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan pada waktu yang akan datang.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 tahun 2017 tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Sedangkan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
- b. Pelaksanaan pembinaan urusan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan Usaha mikro, perindustrian dan perdagangan
- e. Penyelesaian atas pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

1.3 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor: 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

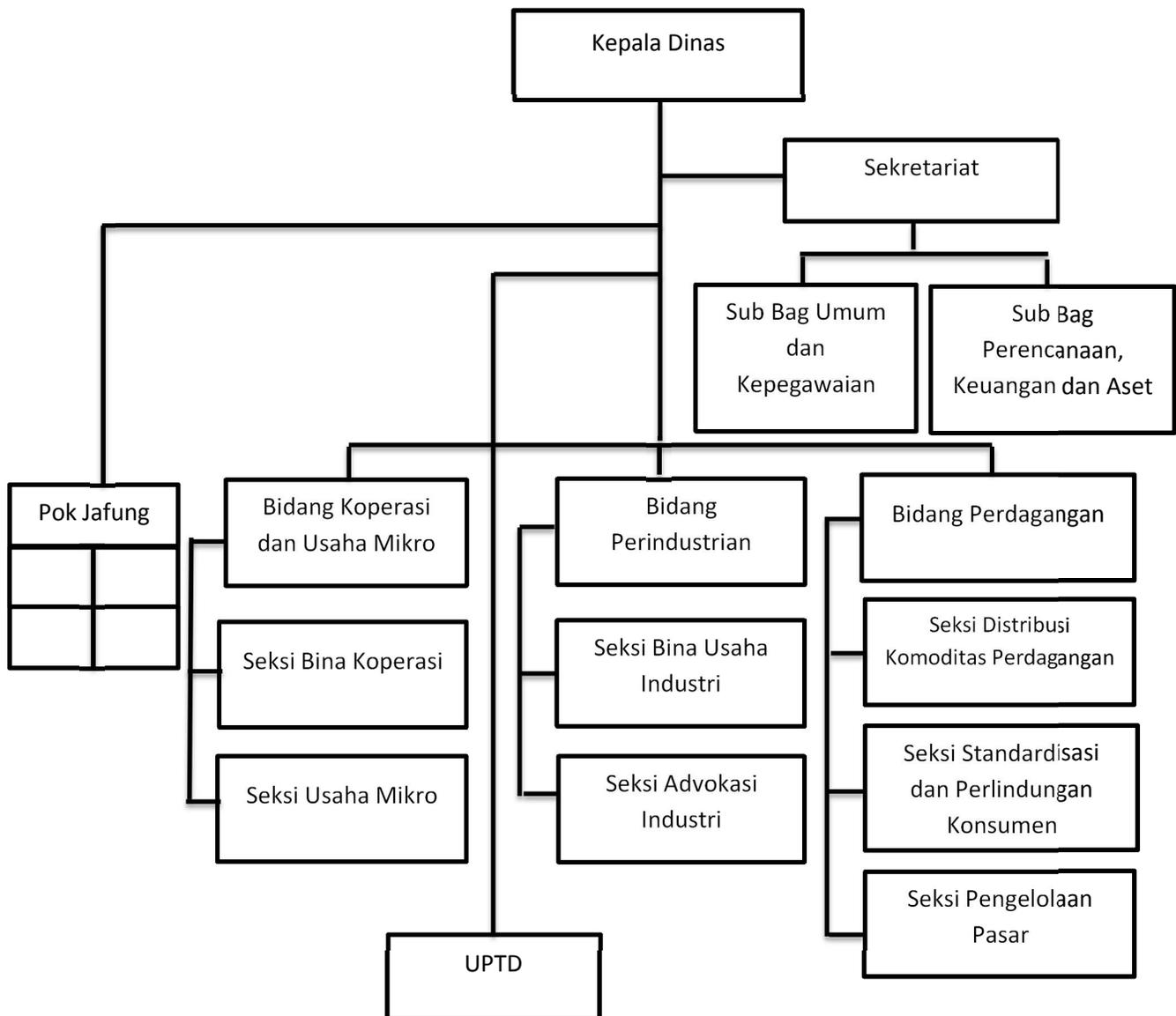
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas ;
 - 1. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 1. Seksi Bina Koperasi
 - 2. Seksi Usaha Mikro
- d. Bidang Perindustrian;
 - 1. Seksi Bina Usaha Industri
 - 2. Seksi Advokasi Industri
- e. Bidang Perdagangan;
 - 1. Seksi Distribusi dan Komoditas Perdagangan
 - 2. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- 3. Seksi Pengelolaan Pasar
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai gambaran, disajikan Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2017

1.4 Isu Strategis Organisasi

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun terakhir, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan beberapa urusan, baik wajib maupun pilihan, yaitu urusan Koperasi dan UMKM, urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan, rumusan isu-isu strategi sebagai berikut :

- a. Kurang berkembangnya koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah;
- b. Belum optimalnya Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian masyarakat;
- c. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 70 tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.6 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Organisasi, Landasan Hukum dan Sistematika

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Meliputi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/244/KUM/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Mengembangkan peran koperasi, UMKM sebagai pelopor pemasar produk olahan dan kerajinan, dengan indikator prosentase koperasi yang berkualitas dan jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil;
2. Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis pertanian lokal dengan indikator prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas;
3. Peningkatan kualitas Pasar Daerah dan Pasar Desa dengan indikator prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan.

2.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Meningkatnya peran koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator prosentase koperasi yang berkualitas dan jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil;

2. Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian masyarakat dengan indikator prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan dengan indikator prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1	Mengembangkan peran koperasi, UMKM sebagai pelopor pemasar produk olahan dan kerajinan	Prosentase Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya peran koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Koperasi yang berkualitas
		Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil		Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil
2	Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal	Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas

3	Peningkatan kualitas Pasar Daerah dan Pasar Desa	Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi Perdagangan	Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan
---	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

2.2. Perjanjian Kinerja 2019

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro	- Prosentase koperasi yang berkualitas	%	36,66	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	432.970.000,-
		- Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	Usaha Kecil	492	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	332.470.000,-
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	151.400.000,-
					Program Pengembangan Sistem	134.270.000,-

					Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
Jumlah						1.051.110.000,-
2	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas	%	4,7	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	863.300.500,- 1.032.246.000,-
Jumlah						1.895.546.500,-
3	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan	%	1,00	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	1.553.930.000,- 5.471.836.564,- 48.100.000,-
Jumlah						7.073.866.564,-

Pada tahun 2019 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator

kinerja yaitu Prosentase koperasi yang berkualitas, Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil, Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas dan Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan.

Indikator Prosentase koperasi yang berkualitas, yaitu dengan angka target adalah 36,66%, Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil, dengan angka target adalah 492 usaha kecil, Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas, dengan angka target 4,7%, dan Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan dengan angka target 1,00%

Indikator Prosentase koperasi yang berkualitas, Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil, didukung oleh empat program utama yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan anggaran Rp 432.970.000,-, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dengan anggaran Rp 332.470.000,-, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan anggaran Rp 151.400.000,-, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan anggaran Rp 134.270.000,-. Sehingga total anggaran program yang mendukung 2 (dua) indikator ini adalah Rp 1.051.110.000,-.

Indikator Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas, didukung oleh dua program utama yaitu Program Pengembangan Industri Kecil Menengah dengan anggaran Rp 863.300.500,- dan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dengan anggaran Rp 1.032.246.000,-. Sehingga total anggaran program yang mendukung indikator ini adalah Rp 1.895.546.500,-.

Indikator Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan, didukung oleh tiga program utama yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan anggaran Rp 1.553.930.000,-, Program Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan anggaran Rp 5.471.836.564,- dan Program pembinaan pedagang kakilima dan

asongan dengan anggaran Rp 48.100.000,-. Sehingga total anggaran program yang mendukung indikator ini adalah Rp 7.073.866.564,-.

Selain program teknis yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala juga memiliki tiga program pendukung yang dijalankan oleh Bagian Sekretariat. Program-program tersebut adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp 448.598.295,-, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp 1.047.034.380,-, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan anggaran Rp 64.500.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Nomor: 188.45/17/Set/Kopperindag/2018 Tahun 2018, tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi yang berkualitas	%	36,66	36,66	100
		Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	Usaha kecil	492	492	100
2	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas	%	4,7	4,7	100
3	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan	%	1,00	1,01	101

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada:

Indikator 1.

“Prosentase koperasi yang berkualitas”, ditargetkan sebanyak 36,66 % dan terealisasi sebanyak 36,66 % koperasi yang berkualitas. Dengan demikian capaian kinerja indikator 1 adalah 100 % ($36,66 / 36,66 \times 100$) atau sesuai target.

Indikator 2.

“Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil”, ditargetkan sebanyak 492 usaha kecil dan terealisasi sebanyak 492) usaha mikro yang menjadi usaha kecil. Dengan demikian capaian kinerja indikator 2 adalah 100 % ($492 / 492 \times 100$) atau sesuai target.

Indikator 3.

“Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas”, ditargetkan sebanyak 4,7 % kelompok pengrajin yang berkualitas dan terealisasi sebanyak 4,7 % kelompok pengrajin yang berkualitas. Dengan demikian capaian kinerja indikator 3 adalah 100 % ($4,7 / 4,7 \times 100$) atau sesuai target.

Indikator 4.

“Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan”, ditargetkan sebanyak 1,00 % pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan dan terealisasi sebanyak 1,01 % pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan. Dengan demikian capaian kinerja indikator 4 adalah 101 % ($1,01 / 1,00 \times 100$) atau melebihi target sebesar 0,01%.

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai target	3
>100	Melebihi target	1

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	4
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 sebanyak 4 (empat) indikator seluruhnya dikategorikan sangat baik.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 188.45/18/Set/Kopperindag/2018 Tahun 2018, tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

**Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2019**

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro	2 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	1 indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	1 indikator

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro	2	100	Sesuai target
2	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	1	100	Sesuai target
3	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	1	101	Melebihi target

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro	2	100					✓
2.	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	1	100					✓
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	1	101					✓

katnya
sarana
dan
prasarana
distribusi
perdagangan

Berdasarkan Tabel 3.2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran maupun indikator sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sangat Baik dikarenakan capaian kinerja sasaran bernilai >90%.

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro	1	100	-	-	1	100	-	-
		1	100	-	-	1	100	-	-
2.	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	1	100	-	-	1	100	-	-

3.	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	1	101	1	101	-	-	-	-
----	----------------------------------------------------------	---	-----	---	-----	---	---	---	---

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tiap –tiap sasaran strategis dengan tingkat pencapaian yang sesuai target (=100%) yaitu 2 (dua) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran strategis yang melebihi target (>100%).

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro**”, maka indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Prosentase koperasi yang berkualitas** dan **Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil**.

Capaian masing-masing sasaran dengan 2 (dua) indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 1)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih	Ket.
			Capaian	Capaian		
1.	Prosentase Koperasi yang berkualitas	%	35,00	36,66	1,66	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 1,66% koperasi yang berkualitas di tahun 2019.

Capaian indikator Sasaran 1 **“Prosentase Koperasi yang berkualitas”** di dukung oleh Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan:

1. Revitalisasi Pengelolaan Organisasi dan Keuangan Koperasi
2. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
3. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi

Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 1 **“Prosentase Koperasi yang berkualitas”** didukung oleh kegiatan Dinas Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan berupa diklat/pelatihan perkoperasian yang mengalokasikan kegiatannya di Kabupaten Barito Kuala dan juga kegiatan perkoperasian yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Diharapkan kegiatan dan pendanaannya dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 1)

No	Indikator SASARAN	Satuan				Ket.
			Relisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	
1.	Prosentase Koperasi yang berkualitas	%	36,66	41,66	40,00	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Capaian Kinerja Sasaran 1 terealisasi sebesar 36,66% koperasi yang berkualitas, jika dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2022 sebesar 41,66%, maka capaian kinerja pada tahun ke-dua Renstra tahun 2019 ini telah terealisasi sebesar 40%.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 1)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih	Ket.
			Capaian	Capaian		
1	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	Usaha kecil	490	492	2	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 usaha mikro yang menjadi usaha kecil di tahun 2019.

Capaian indikator Sasaran 2 **“Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil”** di dukung oleh Program:

1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - 2) Pengembangan Usaha Kecil Menengah
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan: Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan kegiatan: Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah.

Keberhasilan didukung oleh kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan berupa diklat/pelatihan kewirausahaan yang mengalokasikan kegiatannya di Kabupaten Barito Kuala dan juga kegiatan kewirausahaan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK)

Diharapkan kegiatan dan pendanaannya dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 3.2.8
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi
dan Capaian Target Renstra (Sasaran 1)

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi	Target	Capaian	Ket.
			2019	Akhir Renstra	(%)	
1	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	Usaha kecil	492	498	40	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sasaran 1 terealisasi sejumlah 492 usaha mikro menjadi usaha kecil, jika dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2022 sejumlah 498 usaha kecil, maka capaian kinerja pada tahun ke-dua Renstra tahun 2019 ini telah terealisasi sebesar 40%.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat**”, maka indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas**.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.9
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Tahun	Selisih	Ket.
			2018	2019		
			Capaian	Capaian		
1	Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas	%	4,7	4,7	0,00	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4,7% kelompok pengrajin yang berkualitas di tahun 2019.

Capaian indikator Sasaran 3 **“Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas”** di dukung oleh Program:

1. Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan kegiatan: Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan kegiatan: Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 3 **“Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas”** didukung oleh tersedianya dana dalam pembinaan terhadap pengrajin sehingga dapat menghadirkan tenaga ahli yang berkualitas serta dapat memenuhi sarana yang diperlukan dalam meningkatkan keterampilan pengrajin.

Diharapkan keterampilan yang dimiliki oleh pengrajin dapat terus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan, sehingga pengrajin termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan secara terus menerus.

Tabel 3.2.10
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 2)

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi	Target	Capaian	Ket.
			2019	Akhir Renstra	(%)	
1	Prosentase kelompok pengrajin yang berkualitas	%	4,7	25,00	40	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sasaran 2 terealisasi sebesar 4,7% kelompok pengrajin yang berkualitas, jika dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2022 sebesar 25,00% kelompok pengrajin yang berkualitas, maka capaian kinerja pada tahun ke-dua Renstra tahun 2019 ini telah terealisasi sebesar 40%.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan”, maka indikator kinerja yang digunakan, yaitu Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.11
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 3)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih	Ket.
			Capaian	Capaian		
1	Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan	%	0,50	1,01	0,51	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 0,51% prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan di tahun 2019.

Capaian indikator Sasaran 4 “**Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan**” di dukung oleh Program:

1. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan kegiatan:
 - 1) Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen,
 - 2) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa,
 - 3) Kemudahan Perizinan pengembangan usaha.
2. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan kegiatan:
 - 1) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - 2) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
3. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan, dengan kegiatan:
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.

Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 4 **“Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan”** didukung oleh alokasi dana dari Pemerintah Pusat (Kementerian Perdagangan) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan pengadaan peralatan dan kendaraan khusus kemetrolagian sehingga sektor perdagangan dan jasa menjadi tumbuh dan berkembang.

Tabel 3.2.12
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 3)

No	Indikator SASARAN	Satuan				Ket.
			Relisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	
1	Prosentase pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan	%	1,01	2,50	40,4	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sasaran 3 terealisasi sebesar 1,01% pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan, jika dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2022 sebesar 2,50% pertumbuhan barang dan jasa sektor perdagangan, maka capaian kinerja pada tahun ke-dua Renstra tahun 2019 ini telah terealisasi sebesar 40,4%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 14.910.676.814,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 13.646.906.056,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,52 %.

Komposisi belanja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	11.580.655.739	10.859.779.065	93,78
2	Belanja Tidak Langsung	3.330.021.075	2.787.126.991	83,70
Jumlah				

Sumber: RFK dan DPA Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 93,78 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 83,70 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.020.523.064,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.421.080.890 atau 94,02 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya peran koperasi dan Usaha Mikro	1.051.110.000	1.008.814.100	95,98
2	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	1.895.546.500	1.727.278.360	91,12
3	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi Perdagangan	7.073.866.564	6.684.988.430	94,50
Jumlah		10.020.523.064	9.421.080.890	

Sumber: RFK dan DPA Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.4
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya peran koperasi dan Usaha Mikro	2	100	1.008.814.100	95,98
2	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	1	100	1.727.278.360	91,12
3	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi Perdagangan	1	101	6.684.988.430	94,50
Jumlah		4		9.421.080.890	

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan pencapaian 100% yaitu sebanyak 3 (tiga)sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan

sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.2.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya peran koperasi dan Usaha Mikro	2	100	95,98	4,02
2	Meningkatnya IKM dalam perekonomian masyarakat	1	100	91,12	8,88
3	Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi Perdagangan	1	101	94,50	5,50

BAB IV

PENUTUP

Dari seluruh uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang telah ditetapkan dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Pencapaian misi, dan sasaran dari setiap langkah strategi pembangunan yang telah ditetapkan diarahkan untuk peningkatan pelayanan administratif kepada semua perangkat daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menuju pada peningkatan pelayanan yang prima.
3. Tuntutan pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan kontribusi yang seimbang antara unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat, karena itu peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala sebagai lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam bidang pemerintahan dan pelayanan administrasi terus dipacu dan dikembangkan.
4. Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, walaupun sebagian besar sasaran telah dapat dicapai, namun perlu untuk lebih ditingkatkan lagi kualitasnya.